



Massa Geruduk Balai Kota Yogyakarta

Desak Penjabat Wali Kota Hukum ASN Tak Netral di Pilwali

YOGYAKARTA –Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Forum Pengawal Demokrasi Indonesia mendatangi Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Massa yang merupakan pendukung pasangan calon Wali Kota Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli, mendesak Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo segera menjatuhkan hukuman terhadap aparat sipil negara (ASN) di Pemkot Yogyakarta yang tidak netral selama proses Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Yogyakarta 2017.

Rekomendasi dari panwas (Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta) sudah keluar pekan lalu. Kini kami menagih penjabat wali kota yang berjanji akan menghukum ASN setelah ada rekomendasi panwas," kata koordinator aksi, Fokdi Ardiyanto.

Fokki minta penjabat wali kota segera menjatuhkan hukuman sebelum proses gugatan perselisihan hasil Pilwali Yogyakarta 2017 rampung diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab pihaknya turut menyerahkan laporan ketidaknetralan ASN dalam berkas materi gugatan.

"Ada indikasi kuat mobilisasi ASN dalam Pilwali Yogyakarta 2017. Satu ASN sudah direkomendasikan oleh panwas agar dijatuhi hukuman. Masih ada enam ASN lagi yang kami laporkan dan saat ini masih di proses panwas. Jika yang ter-

akhir terbukti melanggar pidana pemilu, kami pastikan pilkada telah gagal," kata Fokki yang juga menjabat Ketua Badan Pemertahanan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta itu.

Diketahui, seorang ASN yang diproses panwas adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono. Dia dilaporkan oleh relawan Imam Fadli, Andi Kartolo, beberapa hari sebelum pemungutan suara pada 15 Februari lalu karena mengunggah ulasan tentang prestasi paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, di grup *Whatsapp* UPT Malloboro. Berdasarkan hasil pemeriksaan, panwas menyatakan Yunianto terbukti melanggar disiplin ASN.

Sulistiyo yang menemui langsung rombongan massa berjanji akan secepatnya menindaklanjuti rekomendasi dari panwas tersebut. Hanya saja, dia perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat Kota Yogyakarta dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan.

"Surat rekomendasi panwas sudah saya terima. Tapi saya bersama Inspektorat dan tim dari BKN perlu merumuskan

hukuman apa yang tepat sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Jangan sampai kita memberi hukuman yang tak sesuai aturan," katanya.

Sulistiyo juga menegaskan tak akan melindungi anak buahnya yang terbukti melanggar aturan. Terlebih kasus ketidaknetralan ASN dalam proses pilwali.

Sementara Inspektur Kota Yogyakarta Wahyu Hidayat mengaku berdasarkan isi rekomendasi dari panwas, Yunianto terbukti melanggar administrasi yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS. Saat ini pihaknya masih mengkaji pelanggaran yang dilakukan apakah memenuhi unsur pelanggaran ringan, sedang, atau berat.

"Jika bersangkutan memakai fasilitas negara saat melakukan pelanggaran, maka bisa masuk kategori pelanggaran berat. Sanksi teringan bagi pelanggaran berat adalah turun pangkat selama tiga tahun. Sanksi terberat adalah diberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya.

Wahyu memprediksi proses kajian rekomendasi panwas akan turun paling cepat dua pekan ke depan. Rabu (1/3) hari ini, pihaknya juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yunianto. "Kami juga lakukan pemeriksaan terhadap terlapor," ujarnya.

Terpisah, Ketua Panwas Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengatakan, pihak-

1.
2.
3.
4.
5.

anjut
 anggap
 etahui
 rs

Yogyakarta,

nya sudah mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Yuniarto. Namun diakuinya, panwas tak memiliki kewenangan memutuskan apa jenis hukuman yang akan dijatuhkan.

Terkait laporan terhadap enam orang ASN, pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan pada Kamis (2/3) besok. Keenam ASN yang terdiri atas empat orang berstatus PNS dan

dua orang tenaga bantuan tersebut dilaporkan melawan Imam-Fadli pada Senin (27/2) lalu karena berfoto memakai baju bertuliskan huruf H&H dan nomor 2 serta mengacungkan dua jari. "Kami minta seluruh ASN yang tidak netral tidak tegas. Mobilisasi dan ketidaknetralan ASN mencoreng demokrasi," ujar pelapor, Chaniago Iseda.

● ristuhanafi



Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyo memberikan penjelasan kepada massa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Imam Priyono - Achmad Fadli yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005